

# **PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI 33 PROVINSI DI INDONESIA**



## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk  
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:  
Raden Rizal Rukanda  
2017110053**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN  
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2021**

# **THE EFFECT OF FINANCIAL INCLUSION ON POVERTY IN 33 PROVINCES IN INDONESIA**



## **UNDERGRADUATE THESIS**

**Submitted to complete part of the requirements for  
Bachelor Degree in Economics**

**By  
Raden Rizal Rukanda  
2017110053**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS  
Accredited by National Accreditation Agency No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
BANDUNG  
2021**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP  
KEMISKINAN DI 33 PROVINSI DI INDONESIA**

Oleh:

Raden Rizal Rukanda

2017110053

Bandung, Februari 2021

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D.

Pembimbing,

Dr. Miryam L. Wijaya

Ko-pembimbing,

Chandra Utama, S.E., M.M., M.Sc.

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Raden Rizal Rukanda  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 November 1998  
NPM : 2017110053  
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan  
Jenis naskah : Skripsi

## JUDUL

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI 33  
PROVINSI DI INDONESIA

Pembimbing : Dr. Miryam L. Wijaya  
Ko-pembimbing : Chandra Utama, S.E., M.M., M.Sc.

## MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelamya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal:

Pembuat pernyataan:



(Raden Rizal Rukanda)

## ABSTRAK

Inklusi keuangan dipercaya dapat menjadi salah satu cara untuk dapat menurunkan kemiskinan. Inklusi keuangan dapat memberikan kesempatan bagi golongan masyarakat miskin atau marginal memperbaiki kehidupannya dengan ketersediaan serta kemudahan untuk dapat menggunakan layanan keuangan formal yang terjangkau dan rendah biaya. Penelitian ini menggunakan rasio jumlah kantor perbankan per 100 ribu penduduk dewasa, rasio jumlah kredit per PDRB, serta rasio jumlah DPK per PDRB untuk menggambarkan inklusi keuangan dari sisi akses dan penggunaan layanan keuangan. Data yang digunakan merupakan data panel 33 Provinsi tahunan periode 2011 hingga 2019 diolah dengan regresi panel data statis. Hasil menunjukkan bahwa inklusi keuangan dengan meningkatkan penggunaan produk perbankan seperti tabungan, giro dan deposito dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Inklusi Keuangan, Kemiskinan, Akses, Layanan Keuangan

## **ABSTRACT**

*Financial inclusion is believed to be one way to reduce poverty. Financial inclusion can provide opportunities for poor or marginal social groups in order to improve their lives with the availability and ease to be able to use the formal financial services are affordable and low cost. This study uses the ratio of the number of banking offices per 100 thousand of the adult population, the ratio of the number of credits per the GRDP, and the ratio of the number of third-party funds per GRDP to describe financial inclusion in terms of access and use of financial services. The data used is panel data of 33 provinces annually for the period 2011 to 2019 processed with static panel data regression. The results show that financial inclusion by increasing the use of banking products such as savings, current accounts and time deposits can reduce poverty in Indonesia.*

**Keywords:** *Financial Inclusion, Poverty, Access, Financial Services*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia”. Skripsi ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari Bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga saran dan kritik sangat diharapkan untuk memperbaiki penelitian ini di kemudian hari. Dengan demikian, penulis bersedia menerima kritik dan saran untuk memperbaikinya di kemudian hari.

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, saya mendapatkan bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Raden Uuk Rukanda dan Ibu Cucu Aisyah, dan juga kepada adik-adik saya Fachry dan Rianti. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada saya. Tanpa adanya dukungan, bimbingan dan kepercayaan yang diberikan, saya tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Dr. Miryam L. Wijaya selaku dosen pembimbing dan Bapak Chandra Utama atas ilmu, didikan, bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada saya baik selama proses pengerjaan skripsi maupun selama proses pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Ivantia Savitri Mokoginta selaku ketua program studi Ekonomi Pembangunan atas bimbingan ilmu dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Ibu Noknik selaku dosen wali saya yang sudah membimbing dan menjadi wali selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih kepada Ibu Siwi, Bapak Charvin, Bapak Aswin, Bapak Ishak, Ibu Deba dan seluruh dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan UNPAR.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Thalia, Syifa, Erica, Riris, Elenna, Alya, Azka, Shendy, Noah, Olo, Armand, William, Nico, Reno, Supit, Danu, Thomi, Andaru, Garry, Bene, dan seluruh keluarga Prodi Ekonomi Pembangunan atas segala dukungan, bantuan dan perhatian yang diberikan kepada saya. Akhir kata saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, Februari 2021

Raden Rizal Rukanda

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Pemikiran .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Peran Sektor Keuangan dalam Pertumbuhan Ekonomi .....	7
2.1.2 Inklusi Keuangan .....	8
2.2 Penelitian Terdahulu .....	10
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....	12
3.1 Data Penelitian .....	12
3.2 Pengembangan Model.....	13
3.3 Metode Penelitian .....	13
3.4 Langkah Penelitian .....	14
3.5 Objek Penelitian.....	17
3.5.1 Kemiskinan.....	17
3.5.2 Inklusi Keuangan .....	18
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	21
4.1 Hasil.....	21
4.1.1 Uji Stasioner .....	21
4.1.2 Penentuan Model Regresi Data Panel .....	22
4.1.3 Hasil Estimasi REM ( <i>Random Effect Model</i> ) .....	24
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	25
4.2 Analisis .....	26
BAB 5 PENUTUP .....	29
5.1 Kesimpulan.....	29
5.2 Saran .....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN.....	32
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	36

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Kemiskinan di Indonesia (2011-2019).....	2
Grafik 2. Indeks Inklusi Keuangan dan Persentase Kemiskinan di Provinsi di Indonesia pada tahun 2019 .....	3
Grafik 3. Rata-Rata Persentase Kemiskinan Tahun 2011-2019 .....	18
Grafik 4. Rata-Rata Rasio Jumlah Kantor Layanan Bank per 100 ribu Penduduk Dewasa 2011-2019.....	19
Grafik 5. Rata-Rata Rasio Jumlah DPK dan Kredit per PDRB tahun 2011-2019 .....	20

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Variabel dan Sumber Data .....	12
Tabel 2. Hasil Unit Root Test Levin, Lin, & Chu .....	22
Tabel 3. Hasil Uji Chow.....	23
Tabel 4. Hasil Uji Hausman .....	23
Tabel 5. Hasil Uji Langrange Multiplier .....	24
Tabel 6. Hasil Random Effect Model (REM) .....	24
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas .....	25

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

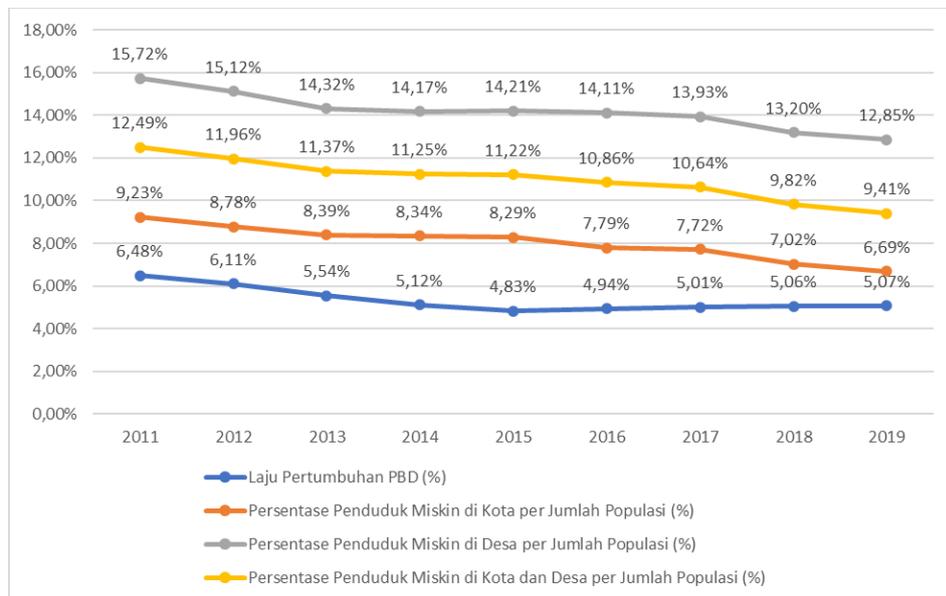
Melanjutkan salah satu tujuan dari *Millenium Development Goal* yaitu menurunkan setengah jumlah penduduk miskin di dunia, *Sustainable Development Goal* menargetkan tidak adanya kemiskinan pada tahun 2030 di dunia. Menurut United Nations (UN), pada tahun 2010 sekitar 15,7% dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menurun menjadi sekitar 10% di tahun 2015 namun laju penurunan tersebut mengalami perlambatan, pada tahun 2019 sekitar 8,2% penduduk dunia masih hidup dengan penghasilan di bawah 1,90 USD. Pemberantasan kemiskinan memerlukan kebijakan visioner untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Inklusi keuangan telah dianggap sebagai alat dinamis untuk mencapai stabilitas makroekonomi multidimensi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kesetaraan pendapatan untuk negara maju dan berkembang (Omar & Inaba, 2020).

Inklusi keuangan adalah konsep multidimensi dari pembangunan keuangan. Menurut Iqbal *et al.* (2020) akses dan penggunaan dari layanan perbankan merupakan dimensi utama dari inklusi keuangan. Bank Dunia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai tersedianya akses ke produk dan layanan keuangan bagi individu maupun pelaku usaha yang berguna dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Data terakhir dari Global Findex pada tahun 2017, terdapat sekitar 1,7 milyar orang dewasa di dunia tidak memiliki rekening di layanan keuangan dan 1,2 miliar orang dewasa telah memperoleh akun sejak 2011 serta 515 juta orang dewasa sejak 2014. Antara 2014 dan 2017, persentase orang dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan atau melalui layanan uang seluler meningkat secara global dari 62 persen menjadi 69 persen. Di negara berkembang, pangsanya naik dari 54 persen menjadi 63 persen. Tersedianya akses ke produk dan layanan keuangan dapat membantu mereka untuk memulai dan memperluas bisnis, berinvestasi dalam pendidikan atau kesehatan, mengelola risiko, dan mengatasi guncangan keuangan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Di Indonesia kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga telah menargetkan bahwa pada akhir tahun 2024 kemiskinan menjadi 7% hingga 6,5%. Pada tahun 2011 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Persentase penduduk miskin juga terus mengalami penurunan tiap tahunnya (Grafik 1.). Terlihat jelas pada tahun 2012 hingga 2017 ketika adanya perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi, tingkat penurunan kemiskinan juga ikut mengalami perlambatan. Hal ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Selain itu, menurut Bank Dunia pada tahun 2017 hanya 49% dari penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akun di institusi formal. Dalam Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 hanya sekitar 38,03% penduduk dewasa yang dikategorikan *well literate* atau melek keuangan.

**Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Kemiskinan di Indonesia (2011-2019)**



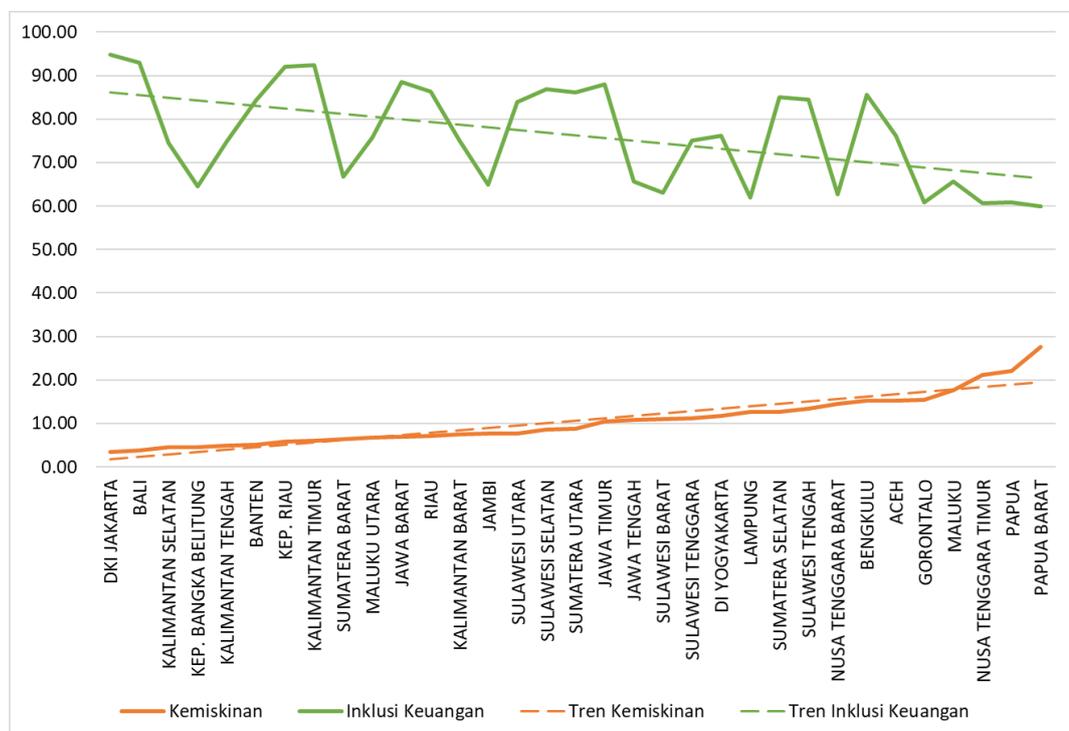
Sumber: Badan Pusat Statistika (diolah)

Menurut data dari Badan Pusat Statistika per Maret 2019 tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,1 juta jiwa, Jawa Tengah sebesar 3,75 juta jiwa, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 3,4 juta jiwa. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin terbesar berada pada kawasan timur Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat 27,53%; Papua 22,17%; NTT 21,09%; Maluku 17,69%; dan Gorontalo 15,52%. Grafik 2. menunjukkan persentase kemiskinan dan indeks inklusi keuangan di provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dengan urutan provinsi yang memiliki persentase kemiskinan terendah hingga tertinggi. Indeks inklusi keuangan memiliki pola berfluktuatif namun memiliki tren negatif. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi yaitu sebesar 94,76% dan memiliki persentase

kemiskinan terendah yaitu 3,47% sedangkan provinsi Papua Barat memiliki indeks inklusi keuangan terendah sebesar 59,84% dan persentase kemiskinan tertinggi yaitu 27,53%.

Demirgüç-Kunt *et al.* (2008) mengatakan bahwa sektor keuangan merupakan induk dari proses pembangunan. Perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor keuangan karena dapat menyediakan layanan keuangan dasar yang bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Namun, tidak seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dalam pembangunan sektor keuangan. Untuk menjawab masalah tersebut sistem keuangan yang inklusif sangat diperlukan. Sistem keuangan yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang aman dan efisien bagi kegiatan dalam sektor keuangan.

**Grafik 2. Indeks Inklusi Keuangan dan Persentase Kemiskinan di Provinsi di Indonesia pada tahun 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistika; Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Penelitian mengenai keterkaitan dari inklusi keuangan terhadap kemiskinan masih terbilang sedikit dengan hasil yang beragam. Park dan Mercado (2016) melakukan penelitian mengenai inklusi keuangan dan kemiskinan di 177 negara dan 37 negara di antaranya merupakan negara berkembang di Asia. Mereka menemukan bahwa inklusi keuangan dapat menurunkan kemiskinan. Dawood *et al.* (2019) dalam penelitiannya menggunakan metode *binary logistic* menemukan bahwa di Indonesia inklusi keuangan dapat menurunkan kemungkinan rumah tangga untuk mengalami kemiskinan absolut.

Inoue (2019) Meneliti hubungan antara kemiskinan dengan inklusi keuangan dan pendalaman keuangan dari bank sektor publik dan bank swasta di India. Ia menemukan bahwa pendalaman keuangan dan inklusi keuangan saling bersinergi dalam menurunkan kemiskinan di India. Berbeda dengan Honohan (2008) yang menemukan bahwa terdapat korelasi negatif antara akses keuangan dengan kemiskinan, namun hal ini hanya berlaku jika hanya akses keuangan saja yang menjadi *regressor* tunggal. Selain itu juga Honohan (2008) menyimpulkan jika pembangunan keuangan dapat menurunkan kemiskinan namun hal tersebut dikarenakan pendalaman keuangan dan bukan karena akses ke keuangan. Pendalaman keuangan didefinisikan sebagai peningkatan rasio aset keuangan suatu negara terhadap produk domestik brutonya sedangkan akses keuangan bukan mengenai seberapa besar aset yang dimiliki tetapi seberapa mudah masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan. Neaime dan Gaysset (2018) yang menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan stabilitas keuangan di negara *Middle East and North Africa* (MENA) tidak menemukan adanya pengaruh inklusi keuangan terhadap penurunan kemiskinan. Begitu pula dengan Mader (2018) yang menentang pandangan inklusi keuangan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan karena kurangnya bukti empiris yang meyakinkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menghilangkan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam beberapa tahun terakhir juga berdampak pada melambatnya penurunan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya membangun pertumbuhan yang inklusif dengan dukungan inklusi keuangan. Keuangan yang inklusif dinilai oleh para pembuat kebijakan dapat memberikan manfaat yang tidak hanya dinikmati bagi individu, tetapi juga untuk menjalankan roda perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DKI Jakarta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi dan memiliki persentase penduduk miskin terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain sebaliknya provinsi Papua Barat memiliki indeks inklusi keuangan terendah namun memiliki persentase kemiskinan tertinggi. Meskipun pada provinsi lain tidak terlihat jelas bahwa indeks inklusi keuangan yang tinggi menandakan persentase kemiskinan yang rendah namun ketika persentase kemiskinan di provinsi di Indonesia diurut berdasarkan terendah hingga tertinggi indeks inklusi keuangan memiliki tren yang negatif. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana dampak dari berbagai indikator inklusi keuangan terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2019. Untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan dimensi akses dan penggunaan dari perbankan yang merupakan dimensi utama dari indeks inklusi keuangan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan nilai indeks inklusi keuangan sebagai indikator untuk menggambarkan inklusi keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat keunikan dari berbagai elemen pembentuk inklusi keuangan. Dimensi akses digambarkan melalui rasio jumlah kantor perbankan per 100.000 orang dewasa sedangkan dimensi penggunaan digambarkan melalui dua indikator yaitu rasio jumlah kredit per PDRB serta rasio jumlah DPK per PDRB. Terakhir untuk menggambarkan kemiskinan penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional. Di Indonesia penduduk dikatakan miskin apabila pengeluaran penduduk tidak dapat memenuhi harga kebutuhan dasar makanan dan non makanan.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

Definisi Inklusi keuangan yang saya gunakan dalam penelitian ini mengacu pada definisi Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia inklusi keuangan merupakan segala upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014, p. 4). Ada beberapa faktor yang menghambat masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal. Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan, dan sosial inklusif. Dari sisi penawaran, masyarakat tidak dapat mengakses layanan keuangan karena kurang tersedianya kantor layanan keuangan, memiliki prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku.

Pembangunan yang inklusif merupakan salah satu strategi dasar yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Menurut Ali & Son (2007) pembangunan yang inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin akses yang sama terhadap peluang yang diciptakan untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Menurut Bank Dunia, sejauh mana pertumbuhan ekonomi itu sendiri membantu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan bergantung pada seberapa inklusif sistem keuangan tersebut. Artinya, efek pertumbuhan dari pembangunan keuangan menjadi *pro-poor* ketika sistem keuangan

inklusif memberi masyarakat yang lebih miskin akses ke berbagai layanan keuangan berkualitas.

Perbankan sebagai lembaga keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya. Akses ke layanan perbankan akan mendorong masyarakat yang sementara kelebihan dana untuk menggunakan produk dari layanan keuangan seperti asuransi, deposito, serta tabungan. Sementara itu bagi masyarakat yang sementara kekurangan dana dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman di bank dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan non formal. Adanya sistem keuangan yang efisien dan inklusif dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.